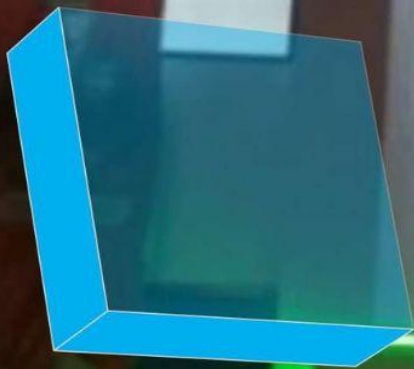




Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah

# LAKIP 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**KESBANGPOL**  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JALAN WISNUSARI NO. 100 TELUKTIGA, KOTA PURWAKARTA 40132

**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**KABUPATEN PURWAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik semakin kompleks dan dinamis, seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang aman, kondusif, dan harmonis.

Purwakarta, 21 Januari 2026  
**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si**  
**NIP. 19661222 199603 1 004**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
1.5 Data Umum .....	13
1.6 Penentuan Isu-isu Strategis .....	17
1.6.1 Peluang .....	17
1.6.2 Tantangan.....	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1 Rencana Strategis .....	20
2.2 Rencana Kinerja .....	25
2.3 Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....	36
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 .....	42
3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah .....	44
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain .....	50
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusinya .....	52
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	62
3.2 Realisasi Anggaran.....	65
3.3 Penghargaan/Prestasi dan Inovasi Teknologi .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
3.1 Kesimpulan.....	73
3.1 Saran.....	74
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang baik (Good Government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perubahan mindset dan cultureset Aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, dari ancaman dan konflik.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Program- program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahun di Implementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar – benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Terhadap hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta senantiasa proaktif menciptakan sistem kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kedudukan sebagai Pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maka seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kesbangpol Kabupaten Purwakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kesbangpol Kabupaten Purwakarta di tahun yang akan datang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( LAKIP ) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor : 239/IX/6/6/2013 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148 ) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 :

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2025.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas capaian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Mewujudkan Pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta atas tugas dan fungsi yang telah dibebankan.
4. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan.

#### **1.4 Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Landasan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan;
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;

6. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sertaprogram dan pelaporan;
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milikdaerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
8. Perumusan inovasiterkait tugas dan fungsinyadalam rangka peningkatan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangankarier;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidangkesatuan bangsa dan politik, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai tugas;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsipenunjang urusan pemerintahan di bidangkesatuan bangsa dan politik;
- e. Pembinaan ketatausahaan Badan dan
- f. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan lingkuptugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kepala Badan mempunyai perincian tugas :

- a. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerah/pihak terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian administrasi kepada seluruh unit organisasi. Koordinasi dukungan Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi: a.

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengoordinasikan kegiatan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangandan Pelaporan ; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan Keuangan dan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris, Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkanbahan penyusunan rencana program, kegiatan dananggaran;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja; dan
- d. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- f. Melaksanakan urusan verifikasidan akuntansi;
- g. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaBadan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragamatan penghayatkepercayaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta dasilitasi kerukunan umat beragamatan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dari Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

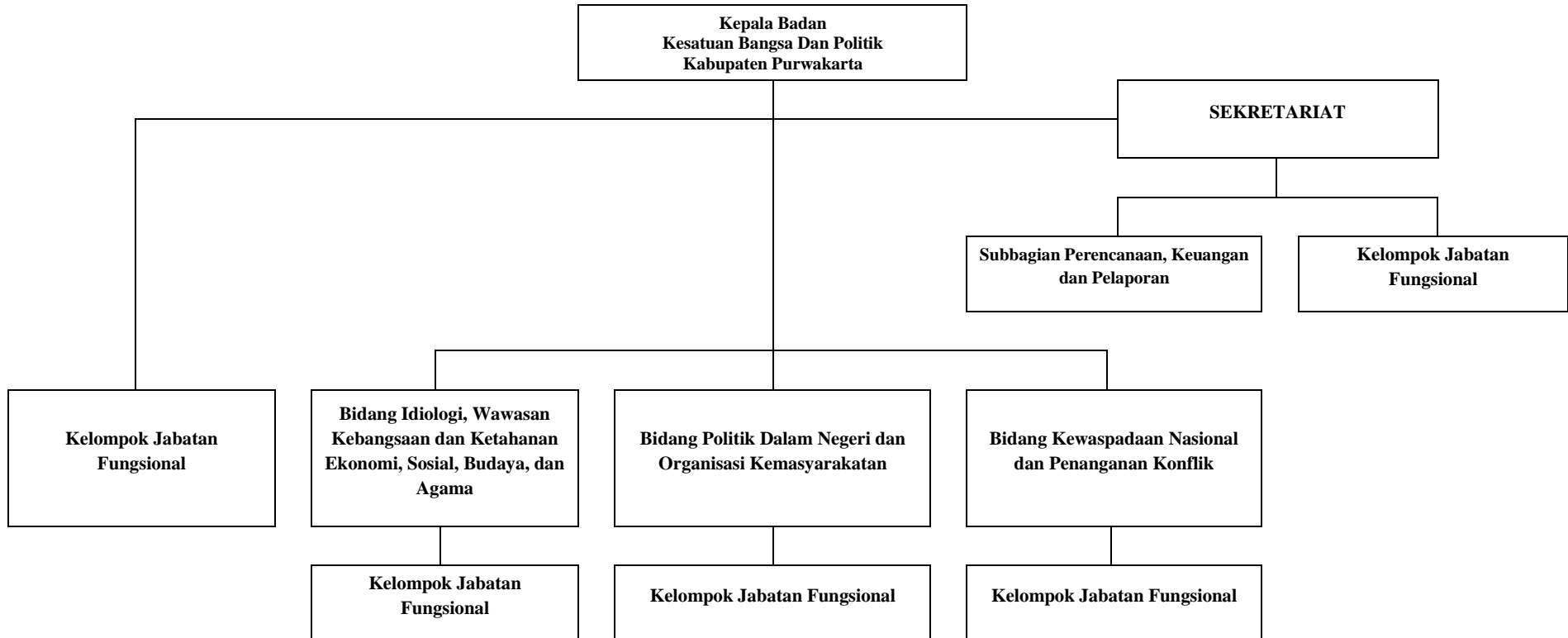
lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik, Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaanbidangkewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaanbidangkewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
- f. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten Purwakarta;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



## 1.5 Data Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa personil, sebagaimana pada berikut :

**Tabel. 1.1**  
**Data Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	Drs. H. Mohamad Ramdhan, M.Si Nip. 19661222 199603 1 004	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Badan
2.	Yus Djunaedi Rusli, S.STP.,M.Si Nip. 19790402 199810 1 001	Pembina Tk.I/IV.B	Sekretaris Badan
3.	Bambang Widiya Atmoko, SH., MH Nip. 19760430 200801 1 003	Pembina/IV.A	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4.	Ilyas Hasanuddin, S.STP., M.Si Nip. 19751227 199603 1 005	Pembina/IV.A	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5.	ARIES RAPELIANTO,ST.,M.Pd NIP. 19821022 200501 1 004	Penata/IIIC	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
6.	Teti Suharteti, A.Md Nip. 19710602 200901 2 001	Penata/III.C	Pengelola Keuangan
7.	Raden Hendra Herawan Nip. 19811108 200801 1 007	Penata Muda/III.A	Pengelola Kepegawaian
8.	Dedeh Juitasari Nip. 19690514 200901 2 001	Penata Muda/III.A	Pengelola Keuangan
9.	Adi Safei Alinurdin Nip. 19810510 201001 1 006	Pengatur Tk.I/II.D	Bendahara
10.	Adinda Risma Ayu Manzilah, S.I.P Nip. 19970925 202506 2 013	Penata Muda/III.A	Penata Kelola Pemerintahan
11.	Bayu Setyo Pangestu, S.Kom Nip. 19990823 202506 1 005	Penata Muda/III.A	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
12.	Asri Aflita Lestari, A.Md Nip. 19870405 202421 2 009	VII	Arsiparis Terampil
13.	Dewi Asiah, A.Md Nip. 19950723 202421 2 003	VII	Pranata Komputer Terampil
14.	Arif Fauzi, S.Pd.I Nip. 19790119 202521 1 001	IX	Penata Layanan Operasional
15.	Dedy Irianto, S.M. Nip. 19890206 202521 1 002	IX	Penata Layanan Operasional

No.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
16.	Istiadzah Yaumul Rahmah, S.A.P. Nip. 19991227 202521 2 003	IX	Penata Layanan Operasional
17.	Linda Lidyawati Nip. 19831201 202521 2 004	V	Pengadministrasi Perkantoran
18.	Yuyun Andayani Nip. 19730622 202521 2 001	V	Pengadministrasi Perkantoran
19.	Endi Juendi Nip. 19700104 202521 1 035		Pengelola Umum Operasional
20.	Asep Saepudin Nip. 19740101 202521 1 088		Operator Layanan Operasional
21.	Heroe Herawan Nip. 19780129 202521 1 033		Operator Layanan Operasional
22.	Deni Kurniawan Nip. 19880430 202521 1 073		Operator Layanan Operasional
23.	Anggy Lizard Anggara Nip. 19850115 202521 1 067		Operator Layanan Operasional
24.	Ferry Apriansyah Abidin Nip. 19990414 202521 1 043		Pengelola Layanan Operasional
25.	Fany Nurhasni Nip. 19960610 202521 2 083		Penata Layanan Operasional
26.	Arizal Isnur Riyaldi Nip. 19980312 202521 1 053		Operator Layanan Operasional
27.	Aup Saepudin Nip. 19920612 202521 1 106		Penata Layanan Operasional
28.	Dhikri Haelatul Akbar Nip. 20020606 202521 1 018		Operator Layanan Operasional
29.	Tafsir Munir Nip. 20020113 202521 1 013		Penata Layanan Operasional
30.	Yani Mulyani, S.E. Nip. 19890108 202521 2 089		Penata Layanan Operasional
31.	Raden Dini Nurauliani Nip. 19960321 202521 2 078		Operator Layanan Operasional
32.	Yudistira, ST Nip. 19881212 202521 1 122		Penata Layanan Operasional
33.	Minda Julia Nur Ervie, S.M Nip. 19990704 202521 2 059		Penata Layanan Operasional
34.	Agustian Nip. 19970807 202521 1 044		Operator Layanan Operasional
35.	Muhammad Naufal Azhar, S.Ak. Nip. 19970908 202521 1 055		Penata Layanan Operasional
36.	Fadly Herdiana Nip. 19971215 202521 1 053		Operator Layanan Operasional
37.	Santi Siti Nursamsiah, S.M Nip. 19960122 202521 2 066		Penata Layanan Operasional

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
	<b>PNS</b>		
1	IV/c	1	
2	IV/b	1	
3	IV/a	2	
4	III/d		
5	III/c	1	1
6	III/b		
7	III/a	2	2
8	II/d	1	
9	II/c		
10	II/b		
11	II/a		
12	I/c		
	Jumlah PNS	8	3
	<b>PPPK</b>		
13	IX	2	1
14	VIII		
15	VII		2
16	VI		
17	V		2
	Jumlah PPPK	2	5
18	Non ASN	14	5
	Jumlah Non ASN	14	5

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan Gol Terbesar pada IVC sebanyak 1 Orang dan Gol Terkecil V sebanyak 2 orang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Jabatan / Esselonering**

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan	1
3	Kassubbag	1
4	Kepala Bidang	3
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jabatan esselonering yang ada sudah semua terisi

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	5
2.	S1	9
3.	D III	3
4.	SLTA	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Pengadaan Barang-barang Inventrasi tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Purwakarta.

Adapun sarana dan prasarana Penunjang Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel. 1.5**  
**Data Penunjang Sarana dan Prasarana**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah dan Bangunan	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	4 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	6 Unit	Baik
4.	Komputer pc	24 Unit	Baik
5.	Printer	20 Unit	Baik
6.	Laptop	10 Unit	Baik
7.	Air Conditioner	20 Unit	Baik
8.	Internet	12 Bulan	Baik
9.	Air dan Listrik	12 Bulan	Baik

### 1.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan Badan yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat ,Badan Kesbangpol dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kepatuhan Ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan;
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- c. Masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- d. Masih rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya generasi muda;
- e. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun dalam mendukung tahapan penyelenggaraan;
- f. Masih rendahnya kualitas, jangkauan, dan efektivitas pendidikan politik bagi masyarakat.

#### 1.6.1 Peluang

1. Adanya sinkronisasi visi misi kabupaten dengan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan;
2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur

- dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021;
3. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024;
  4. Ketersediaan jaringan Kerjasama dengan instansi terkait dan vertikal;
  5. Jaringan luas dengan ormas, parpol, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
  6. Akses ke forum koordinasi keamanan & politik (Forkopimda);
  7. Potensi dukungan bonus demografi (pemuda) untuk pendidikan politik & kebangsaan.

### **1.6.2 Tantangan**

1. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat fasilitatif dan koordinatif masih membatasi pelaksanaan peran dalam penanganan isu politik, ideologi, dan ketahanan sosial secara langsung;
2. Ketersediaan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, belum sepenuhnya sebanding dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi;
3. Dukungan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan luasnya cakupan tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, yang dalam praktiknya masih menghadapi perbedaan prioritas dan kebijakan antarperangkat daerah;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat berdampak pada meningkatnya penyebaran informasi negatif, hoaks, ujaran kebencian, dan paham radikalisme;
6. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas berpotensi melemahkan ketahanan sosial masyarakat;
7. Meningkatnya potensi intoleransi serta masuknya ideologi transnasional berimplikasi pada kerentanan terhadap gangguan stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat;
8. Cakupan pembinaan politik, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ideologi masyarakat belum merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan;

9. Struktur demografi yang didominasi usia produktif berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan politik apabila tidak diimbangi dengan pemahaman kebangsaan dan partisipasi positif;
10. Dinamika politik nasional dan global serta masih adanya resistensi sebagian organisasi kemasyarakatan terhadap regulasi pemerintah berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan daerah.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini sebagai bentuk informasi pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok, fungsi, dan gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana serta pembiayaan Perangkat Daerah.

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Rencana Kinerja Tahun 2025, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta disusun sebagai pedoman pelaksanaan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan transisi. Penyusunan rencana strategis ini juga diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperkuat stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban umum, serta ketahanan sosial masyarakat. Sebagai tolak ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta diambil dari perwujudan visi Kabupaten Purakarta.

Pada periode transisi perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024–2026, visi pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah.”** Visi tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, sehat secara jasmani dan rohani, serta berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai moral serta kebangsaan. Misi kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi acuan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yaitu :

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Selanjutnya, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029, arah pembangunan daerah ditetapkan melalui visi **“PURWAKARTA ISTIMEWA”**. Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi

pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Kedepan lebih berfokus pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan daerah yang mantap dan dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi secara tepat, terarah, terencana dan terpadu. Misi Kabupaten Purwakarta mempunyai 1 Misi yaitu :

“Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.”

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Renstra adalah meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, serta peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan RPD, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya guna, aman, tentram, dan damai, serta mendukung tujuan RPJMD Kabupaten Purwakarta, yaitu mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran strategis yang meliputi meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis, meningkatnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan, meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan, serta meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Sasaran tersebut selaras dengan sasaran RPD berupa meningkatnya ketentraman dan kerukunan masyarakat, serta sasaran RPJMD yang menekankan pada pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama, penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah, baik RPD maupun RPJMD. Indikator kinerja yang digunakan mencakup aspek penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, partisipasi dan kualitas demokrasi, peran serta organisasi kemasyarakatan, kerukunan umat beragama, kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial, serta akuntabilitas kinerja

perangkat daerah, indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada
5. Indeks optimalisasi peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
6. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan
7. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
8. Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan

**Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026**

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkadaes)
3. Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik
4. Persentase organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan laporan kegiatan
5. Tingkat peserta pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan
6. Tingkat penyelesaian konflik sosial

**Daftar Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029**

1. Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah
2. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal
3. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat
4. Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka
5. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkadaes)
6. Persentase keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik dan demokrasi
7. Persentase organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan laporan kegiatan
8. Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif
9. Persentase jumlah mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan yang berhasil diselesaikan

10. Persentase kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan
11. Tingkat penyelesaian konflik sosial
12. Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah

Perbedaan indikator dan target kinerja antara perencanaan yang mengacu pada RPD dan RPJMD disebabkan oleh perbedaan periode dan fokus perencanaan. RPD Tahun 2024–2026 disusun sebagai dokumen perencanaan transisi yang menitikberatkan pada kesinambungan program serta pencapaian output kegiatan jangka pendek, sehingga indikator yang digunakan cenderung bersifat operasional dan kuantitatif. Sementara itu, indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029 lebih berorientasi pada pencapaian outcome dan dampak jangka menengah, serta diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

Penyesuaian indikator dan target kinerja juga dilakukan sebagai bentuk penajaman sasaran strategis perangkat daerah, penyelarasan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta penyesuaian terhadap dinamika kondisi sosial, politik, dan keamanan daerah. Dengan demikian, perubahan indikator dan target tersebut tidak menunjukkan inkonsistensi perencanaan, melainkan merupakan upaya untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta. Untuk melihat perbandingan target tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

**Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu Pada RPD dan RPJMD**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	Persen	70	75	80	80	80
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Persen	0	0	0	0	100
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks	65	70	75	80	83
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	Persen	40	60	70	80	85
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	85,25	85,30	85,35	85,40	85,41
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	Persen	20	30	40	50	55

## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2025 diturunkan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klarifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Rencana Kerja Tahunan memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2025. Komponen rencana kerja tahunan tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran dengan memperhatikan /kegiatan,output dan indikator output,serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, layak dicapai serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2025, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2025 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2025. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

## Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.066.000
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.967.000
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.610.871.611
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.215.000
		5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.936.000
		6 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.987.000
		7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.000.000
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 38.638.000
		9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 97.493.750
		10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 208.686.711
		11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 48.787.000
		12 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 32.232.000
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 39.250.000
		14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 50.000.000
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 157.293.000
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.482.000
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.960.728
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 640.340.000
		19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.900.000
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.180.000
2	Program Penguatan Ideologi	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.605.424.485

No	Program	Kegiatan		Anggaran
	Pancasila dan Karakter			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 2.744.250.000
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 432.037.500
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 422.020.000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 54.232.500
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 17.280.000
		3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 50.881.750
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 129.190.500

No	Program	Kegiatan		Anggaran
	Penanganan Konflik Sosial	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 849.491.500
		3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.183.213.500
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 11.669.307.535</b>

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara review Instansi Pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	65
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	0
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	60
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,1
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	10

Tabel 2.4

## Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Program	Kegiatan		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.541.000	Rp 6.066.000
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.343.000	Rp 5.967.000
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.828.908.492	Rp 2.610.871.611
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.635.000	Rp 6.215.000
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 7.281.000	Rp 5.936.000
		6	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya	Rp 51.400.000	
		7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 7.323.000	Rp 5.987.000
		8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 38.638.000	Rp 38.638.000
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 97.498.250	Rp 97.493.750
		11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 201.093.422	Rp 208.686.711
		12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 98.495.000	Rp 48.787.000
		13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 71.481.000	Rp 32.232.000
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 100.000.000	Rp 39.250.000

No	Program	Kegiatan		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
		15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 157.293.000	Rp 157.293.000
		17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000	
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.482.000	Rp 20.482.000
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.960.728	Rp 99.960.728
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 574.340.000	Rp 640.340.000
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.900.000	Rp 29.900.000
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.180.000	Rp 27.180.000
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.569.289.970	Rp 1.605.424.485
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 3.158.120.000	Rp 2.744.250.000

No	Program	Kegiatan		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 654.693.000	Rp 432.037.500
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 779.752.000	Rp 422.020.000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 100.000.000	Rp 54.232.500
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 38.720.000	Rp 17.280.000
		3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 52.943.000	Rp 50.881.750

No	Program	Kegiatan		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 152.960.000	Rp 129.190.500
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 1.033.220.000	Rp 849.491.500
		3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.190.240.000	Rp 1.183.213.500
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 13.116.433.862</b>	<b>Rp 11.669.307.535,00</b>

Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan berdasarkan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Secara umum, terdapat penyesuaian anggaran pada sebagian besar kegiatan, baik berupa penurunan maupun peningkatan, sebagai hasil evaluasi kebutuhan dan prioritas pelaksanaan program. Total anggaran mengalami penurunan dari Rp13.116.433.862 pada anggaran murni menjadi Rp11.669.307.535 pada anggaran perubahan.

Perubahan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 terjadi sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah daerah serta hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan riil di lapangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh adanya penajaman prioritas program dan kegiatan, penyesuaian terhadap target kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Perubahan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan capaian kinerja perangkat daerah serta memastikan keterkaitan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan laporan monev realisasi kinerja dan keuangan dengan rumus, sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	91%- 100 %	Sangat Tinggi
2.	76%-90%	Tinggi
3.	66%-75%	Sedang
4.	51%-65%	Rendah
5.	<50%	Sangat Rendah

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan IKU, IKK, dan target yang telah disesuaikan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029. Dengan demikian, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 mencerminkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan kerangka perencanaan strategis, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan untuk perbandingan antara lain :

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya dijelaskan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Prwakarta Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA	SUMBER DATA
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>								
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	A	BB	75,45	Sedang	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	100	Baik	Yanlinksmart Purwakarta
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	Persen	65	65	100	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Persen	0	0	100	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks	60	60	100	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	Persen	40	40	100	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	85	85	99,88	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	Persen	10	10	100	Sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
<i>Rata-Rata</i>						<b>96,92</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	86,3	86,3	Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades)	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik dan demokrasi	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA	SUMBER DATA
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	85	85	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
		Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah	Persen	100	100	100	sangat Tinggi	Kesbangpol Purwakarta
<b><i>Rata-Rata</i></b>						<b>97,61</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik, Berikut Penjelasan lengkap mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2025 :

1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah.

Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum optimal. Indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah memperoleh predikat BB dengan capaian 75,45%, yang berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi evaluasi kinerja internal. Di sisi lain, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100% dengan predikat Baik, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Perbedaan capaian antara indikator SAKIP dan IKM mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan dirasakan baik oleh masyarakat, pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja internal masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan capaian pelayanan publik.

2. Sasaran Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat optimal, ditandai dengan capaian 100% pada indikator persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila. Hal ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran, berkesinambungan, serta mampu menjangkau kelompok sasaran secara efektif. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

3. Sasaran Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis

Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada menunjukkan capaian 100%. Meskipun indikator ini bersifat event based dan tidak diukur dalam bentuk target numerik tahunan, capaian tersebut mencerminkan kondisi politik daerah yang stabil, aman, dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari peran perangkat daerah dalam melakukan pembinaan politik, fasilitasi pendidikan politik, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik daerah.

4. Sasaran Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta optimalisasi peran serta ormas.

Secara umum, sasaran ini menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi. Indeks optimalisasi peran serta ormas serta persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masing-masing mencapai 100%, menandakan bahwa organisasi kemasyarakatan telah berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan. Sementara itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencapai 99,88%, sedikit di bawah target namun tetap berada dalam kategori sangat tinggi. Selisih capaian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi kerukunan secara umum dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang bersifat lokal dan temporer. Secara keseluruhan, kondisi sosial kemasyarakatan di daerah dapat dikategorikan harmonis dan kondusif.

5. Sasaran Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial

Capaian indikator persentase pengurangan potensi konflik mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa sistem deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta mekanisme koordinasi penanganan konflik telah berjalan secara efektif. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025**

Keberhasilan program atas realisasi dan capaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2023-2024. Pada Tahun 2025 terjadi peralihan dari RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 ke RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Hal ini menyebabkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 ke Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Adapun Perbandingan antara capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025**

No	Indikator Kinerja	2024			2025			Peningkatan Capaian Dari Tahun 2024 ke Tahun 2025
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	BB	70,60	A	BB	75,45	Meningkat 6,87%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100	Stabil
3.	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	-	-	-	65	65	100	-
4.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	-	-	-	0	0	100	-
5.	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	-	-	-	60	60	100	-
6.	Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	-	-	-	40	40	100	-
7.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100	85,00	85,00	85,1	85	99,88	Meningkat 17,51%
8.	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	-	-	-	10	10	100	-

Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024–2025, secara umum capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan kondisi yang stabil dan terjaga. Indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan 2025 berada pada kategori A–BB, yang mencerminkan konsistensi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik pada kedua tahun, menandakan pelayanan publik yang telah memenuhi harapan masyarakat. Pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), realisasi capaian tahun 2024 sebesar 85,00 dan Meningkat pada tahun 2025 dengan target 85,1 dan realisasi 85,00 serta capaian 99,88%, yang menunjukkan kondisi kerukunan sosial yang relatif stabil. Sementara itu, beberapa indikator lainnya seperti pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada, optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan, serta pengurangan potensi konflik sosial telah ditetapkan targetnya sebagai arah peningkatan kinerja, namun masih memerlukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan agar capaian kerjanya dapat terealisasi secara optimal pada periode berikutnya.

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan Realisasi tahun ini dengan target jangka menengah dibandingkan dengan akhir periode RPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Jangka Menengah**

NO	Sasaran Strategis/ Program	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir		Tingkat Kemajuan	
				RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029	RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>							
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	A	A	Belum Mencapai Target	Belum Mencapai Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	B	Baik	100	100
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	65		80		81%
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	0		0		100%
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	60		80		75%
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40		80		50%
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85	81,45	85,4	104%	100%

NO	Sasaran Strategis/ Program	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir		Tingkat Kemajuan	
				RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029	RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	10		50		20%
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	86,3		100		86%
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	100		100		100%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat	100	100	100	100%	100%
		Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka	100		100		100%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades)	100	100	100	100%	100%
		Persentase keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik dan demokrasi	100	100	100	100%	100%

NO	Sasaran Strategis/ Program	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir		Tingkat Kemajuan	
				RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029	RPD Tahun 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	100	100	100	100%	100%
		Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif	100		100		100%
		Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan	100		100		100%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	85	100	100	85%	85%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100	100	100	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah	100		100		100%

Berdasarkan tabel evaluasi capaian kinerja, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbedaan dengan indikator yang tercantum dalam RPD Tahun 2024–2026. Perbedaan tersebut terjadi sebagai akibat adanya perubahan dan penyesuaian dalam kebijakan serta arah perencanaan daerah, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan dokumen perencanaan terbaru. Penyesuaian indikator dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja agar lebih relevan, terukur, dan mampu menggambarkan capaian kinerja secara lebih akurat sesuai dengan dinamika serta kebutuhan aktual daerah. Secara umum, meskipun terdapat perbedaan indikator, capaian kinerja menunjukkan progres yang cukup baik, dengan sebagian indikator telah mencapai target, sementara indikator lainnya masih memerlukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target akhir perencanaan.

Secara umum, capaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antara indikator yang telah mencapai target dan indikator yang masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi target akhir dokumen perencanaan (RPD 2024–2026 dan RPJMD 2025–2029).

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah, indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 berada pada predikat BB, sementara target akhir baik pada RPD maupun RPJMD adalah A. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target akhir, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai predikat Baik dan target sebesar 100%, yang menandakan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Pada sasaran meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, indikator persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila mencapai 65% pada Tahun 2025 dari target akhir 80%, dengan tingkat kemajuan sebesar 81%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih diperlukan penguatan program dan kegiatan agar target akhir dapat tercapai sesuai perencanaan.

Pada sasaran terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis, indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada menunjukkan tingkat kemajuan 100%. Meskipun indikator ini bersifat event based dan tidak ditetapkan target numerik tahunan, capaian tersebut menggambarkan kondisi politik daerah yang relatif stabil, aman, dan kondusif.

Pada sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta optimalisasi peran serta organisasi kemasyarakatan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Indeks optimalisasi peran serta ormas mencapai nilai 60 dari target akhir 80, dengan tingkat kemajuan 75%. Selanjutnya, persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan mencapai 40% dari target akhir 80%, dengan tingkat kemajuan 50%, yang menunjukkan bahwa partisipasi ormas masih perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 85, melampaui target RPD (81,45) dan target RPJMD (85,4), sehingga tingkat kemajuan mencapai 104% dan 100%. Hal ini mencerminkan kondisi kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik di daerah.

Pada sasaran meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan, persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan baru mencapai 10% dari target akhir 50%, dengan tingkat kemajuan 20%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini dan pencegahan konflik telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan strategi dan intensifikasi koordinasi lintas sektor agar target akhir dapat tercapai.

Ditinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat realisasi keuangan sebesar 86,3% dari target 100%, dengan tingkat capaian 86%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, indikator Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal telah mencapai 100%, mencerminkan pengelolaan aset daerah yang efektif. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter menunjukkan kinerja sangat optimal, dengan seluruh indikator mencapai 100%, baik pada peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila maupun keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik juga menunjukkan capaian sangat tinggi, dengan seluruh indikator mencapai 100%, yang menandakan efektivitas pelaksanaan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat serta pemuda. Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, seluruh indikator mencapai 100%, baik pada aspek pelaporan kegiatan, peningkatan kapasitas ormas, maupun penyelesaian mediasi sengketa ormas. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencatat capaian 85% dari target 100%, yang menunjukkan kinerja cukup baik namun

masih memerlukan peningkatan cakupan dan intensitas kegiatan agar target akhir dapat tercapai. Sementara itu, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan capaian 100% pada seluruh indikator, mencerminkan efektivitas upaya penyelesaian konflik dan penurunan jumlah konflik sosial di daerah.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dengan standar nasional. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta belum ada, maka perbandingan di bandingkan dengan kabupaten tanjung jabung barat Provinsi jambi. Karena Indikator Kinerja dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tidak sama dan hanya beberapa indikator saja yang sama, maka perbandingan dilakukan terhadap indikator yang sama, Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

NO	SASARAN	IKU	Realisasi 2025	Badan Kesbangpol Kab Tanjung Jabung Barat	% Capaian
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40 %	45 %	88,89 %
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85 %	69,3	122,66 %

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat diketahui bahwa hasil perbandingan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat daya saing kinerja yang baik dibandingkan dengan instansi sejenis. Hal ini terutama tercermin pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang menunjukkan capaian di atas standar pembandingan. Meskipun Pada Indikator Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan realisasinya belum mengimbangi target Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun persentase capaiannya cukup tinggi yaitu 88,89 %. Ke depan, penguatan konsistensi dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat terus dilakukan guna meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dibandingkan dengan instansi sejenis.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusinya

Tabel 3.6

#### Identifikasi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

NO	SASARAN	IKU	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	BB	75,45	Belum terpenuhinya secara maksimal dokumen pendukung	1. Pemenuhan dokumen secara maksimal. 2. Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi aparatur Badan Kesbangpol terkait penyusunan dokumen kinerja berbasis hasil. 3. Melakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi kinerja juga penting agar sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	Pelayanan masyarakat sudah terpenuhi	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Badan Kesbangpol dapat menerapkan strategi peningkatan kualitas layanan berbasis digital (e-government), meningkatkan kompetensi aparatur dalam melayani masyarakat, serta memperkuat mekanisme umpan balik melalui survei berkala
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif	65	65	100	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif	Untuk mempertahankan capaian kinerja dilakukan Peningkatan kualitas dan variasi metode sosialisasi nilai-nilai Pancasila serta perluasan sasaran kegiatan internalisasi ideologi.

NO	SASARAN	IKU	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	wawasan kebangsaan	terhadap ideologi Pancasila				terhadap ideologi Pancasila sudah terpenuhi	
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	0	0	0	Target dan realisasi indikator sama-sama tercatat 0, dengan tingkat capaian 0%, disebabkan tidak adanya pelaksanaan pemilu/pilkada pada tahun berjalan	
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	60	60	100	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sudah terpenuhi	Untuk mempertahankan capaian kinerja dilakukan Peningkatan pembinaan dan fasilitasi ormas serta mendorong sinergi ormas dengan program pembangunan daerah
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40	40	100	Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sudah terpenuhi	Untuk mempertahankan capaian kinerja Pendataan dan pembinaan ormas secara berkelanjutan serta peningkatan kemitraan ormas dengan pemerintah daerah

NO	SASARAN	IKU	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,1	85,00	99,88	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sudah terpenuhi	Untuk mempertahankan capaian kinerja Mempertahankan dan memperkuat pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama dan deteksi dini potensi konflik.
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	10	10	100	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan sudah terpenuhi	Untuk mempertahankan capaian kinerja Penguatan sistem kewaspadaan dini, pemutakhiran peta potensi konflik, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat.

Berdasarkan Tabel Identifikasi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, secara umum capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah terdapat dua indikator kinerja utama, yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan memperoleh nilai A, namun realisasi yang dicapai masih berada pada kategori BB dengan tingkat capaian sebesar 75,45%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya dokumen pendukung kinerja secara maksimal, khususnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berbasis hasil. Sebagai upaya perbaikan, Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta telah dan akan melakukan pemenuhan dokumen kinerja secara lebih optimal, menyelenggarakan pelatihan khusus bagi aparatur terkait penyusunan dokumen kinerja berbasis hasil, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai target dengan kategori “Baik” dan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan harapan. Ke depan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Badan Kesbangpol akan menerapkan peningkatan kualitas layanan berbasis digital (e-government), meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan publik, serta memperkuat mekanisme umpan balik melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Pada sasaran Meningkatkan Internalisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Indikator kinerja pada sasaran ini adalah persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila. Target yang ditetapkan sebesar 65% dan realisasi capaian juga sebesar 65%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila telah berjalan dengan baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Badan Kesbangpol akan melakukan peningkatan kualitas dan variasi metode sosialisasi, serta memperluas sasaran kegiatan internalisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran Terciptanya Iklim Politik Daerah yang Kondusif, Partisipatif, dan Demokratis Indikator kinerja yang digunakan pada sasaran ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada. Target dan realisasi pada tahun berjalan sama-sama tercatat sebesar 0%,

dengan tingkat capaian 0%. Hal ini disebabkan tidak adanya pelaksanaan pemilu atau pilkada pada tahun pelaporan, sehingga indikator tersebut tidak dapat diukur secara aktual. Meskipun demikian, Badan Kesbangpol tetap melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan penguatan etika serta budaya politik masyarakat sebagai langkah persiapan dalam mendukung terciptanya iklim politik yang kondusif pada pelaksanaan pemilu/pilkada berikutnya.

Pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Optimalisasi Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Pada sasaran ini terdapat beberapa indikator kinerja, yaitu Indeks Optimalisasi Peran Serta Ormas dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat, Persentase Ormas yang Aktif dan Berkontribusi Positif terhadap Pembangunan, serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks optimalisasi peran serta ormas ditargetkan sebesar 60 dan berhasil direalisasikan sebesar 60 dengan tingkat capaian 100%. Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan juga mencapai target 40% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan telah berjalan secara efektif. Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ditargetkan sebesar 85,10 dan terealisasi sebesar 85,00 dengan tingkat capaian 99,88%. Capaian ini menunjukkan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Purwakarta berada pada kategori baik. Untuk mempertahankan capaian kinerja pada sasaran ini, Badan Kesbangpol akan terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi ormas, mendorong sinergi ormas dengan program pembangunan daerah, serta memperkuat dialog lintas agama dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial berbasis isu keagamaan.

Dan pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Deteksi Dini dan Respon Cepat terhadap Potensi Konflik Sosial dan Gangguan Keamanan Indikator kinerja pada sasaran ini adalah persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan. Target yang ditetapkan sebesar 10% dan realisasi capaian juga sebesar 10%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial telah berjalan secara efektif. Ke depan, Badan Kesbangpol akan terus melakukan pemutakhiran peta potensi konflik, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

### **3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mengelola input (sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, waktu,

sarana prasarana) untuk menghasilkan output atau outcome yang maksimal. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang mencakup analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang dikelola oleh instansi digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Nomor 214/PMK.02/2017, rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n-1} (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi = Realisasi Anggaran Keluaran i

CAKi = Capaian Keluaran i

Kemudian melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya tahun 2025, dapat dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi atas realisasi sasaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Program	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Indikator Kinerja Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 4.181.285.800	Rp 3.569.465.242	87,72	3 %	56,70 %
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	Rp 1.605.424.485	Rp 1.387.653.400	100	14 %	83,91 %
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Rp 3.176.287.500	Rp 3.105.337.000	100	2 %	55,58 %
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	Rp 422.020.000	Rp 238.382.000	100	44 %	158,79 %

No	Sasaran	Program	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Indikator Kinerja Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Rp 122.394.250	Rp 80.594.750,00	99,88	34 %	135,18 %
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	Rp 2.161.895.500	Rp 1.830.518.386	100	15 %	88,32 %

Berdasarkan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program dihitung dengan menggabungkan capaian seluruh indikator dalam satu program menggunakan rumus jumlah capaian indikator dibagi jumlah indikator pada masing-masing program.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dua indikator menunjukkan capaian program sebesar 87,72 %, diperoleh dari rata-rata capaian indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat, Program ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 4.181.285.800 dengan realisasi sebesar Rp 3.569.465.242, yang menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 3 % dan nilai efisiensi sebesar 56,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup efektif dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien serta tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100 %, sehingga capaian program sama dengan capaian indikator tersebut. Dari pagu anggaran sebesar Rp 1.605.424.485 terealisasi Rp 1.387.653.400, dengan tingkat efisiensi sebesar 14 % dan nilai efisiensi sebesar 83,91 %. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan secara optimal dengan pengelolaan anggaran yang hemat dan efektif.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik juga memiliki satu indikator dengan capaian sebesar 100 %. Program ini didukung anggaran sebesar Rp 3.176.287.500 dengan realisasi Rp 3.105.337.000, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 2 persen dan nilai efisiensi sebesar 55,58 %. Tingginya capaian menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki dua indikator kinerja, sehingga capaian program dihitung berdasarkan rata-rata capaian kedua indikator dan menghasilkan capaian sebesar 100 %. Program ini memperoleh pagu anggaran Rp 422.020.000 dengan realisasi Rp 238.382.000, yang mencatat tingkat efisiensi sebesar 44 % dan nilai efisiensi sebesar 158,79 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program mampu mencapai target kinerja secara optimal dengan tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki satu indikator yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian sebesar 99,88 %. Dari pagu anggaran sebesar Rp 122.394.250 terealisasi Rp 80.594.750, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 34 % dan nilai efisiensi sebesar 135,18 %. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja hampir seluruhnya tercapai dengan pengelolaan anggaran yang efisien.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki satu indikator dengan capaian sebesar 100 %. Program ini didukung pagu anggaran Rp 2.161.895.500 dengan realisasi Rp 1.830.518.386, yang menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 15 % dan nilai efisiensi sebesar 88,32 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8

Analisis Program yang Menunjang urusan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	Menunjang, program ini dilaksanakan untuk mendukung kinerja pada badan kesatuan bangsa dan politik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	
2	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	65	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	65	Menunjang, dalam pelaksanaannya program ini lebih kepada Pendidikan karakter, pemahaman tentang ideologi Pancasila.
3	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	0	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	0	Menunjang dimana program ini dilaksanakan untuk mendukung jalannya pelaksanaan pendidikan serta pelatihan dalam pelaksanaan politik di lingkungan Kabupaten Purwakarta
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	60	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	60	Menunjang, program ini dilaksanakan untuk tujuan pengawasan dan pengamanan serta pembinaan ormas di

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	40	lingkungan Kabupaten Purwakarta
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	Menunjang, program kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung pada indikator indeks kerukunan umat beragama, dimana dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan Forum kerukunan umat beragama, monitoring serta pengawasan kerukunan umat beragama di lingkungan Kabupaten Purwakarta
5	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	10	Menunjang pada indikator kepuasan masyarakat di mana program ini meningkatkan ketentraman dan keamanan di lingkungan daerah Kabupaten Purwakarta

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berperan penting dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Program ini secara langsung mendukung penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan secara nyata menunjang sasaran meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Melalui program ini, persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dan sosialisasi ideologi Pancasila berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pada sasaran terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik berfungsi sebagai program pendukung utama. Meskipun pada tahun pelaporan tidak terdapat pelaksanaan pemilu atau pilkada, program ini tetap dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan peningkatan pemahaman politik masyarakat, sehingga berperan sebagai langkah persiapan dalam mendukung pelaksanaan demokrasi pada periode berikutnya.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara signifikan menunjang sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat dan optimalisasi peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan. Program-program tersebut mendukung pencapaian indikator optimalisasi peran ormas, persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan, serta terjaganya kerukunan umat beragama di Kabupaten Purwakarta melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penguatan forum kerukunan umat beragama.

Sementara itu, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berperan dalam menunjang sasaran meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan. Program ini mendukung pencapaian indikator pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas, ketentraman, dan keamanan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada APBD Perubahan Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp. 11.512.014.535,-** Realisasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai Sebesar **Rp. 4.495.871.800,-** Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai Sebesar **Rp. 1.605.424.485,-** Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mencapai Sebesar **Rp. 3.176.287.500,-** Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai Sebesar **Rp. 422.020.000,-** Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencapai Sebesar **Rp.122.394.250,-** Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mencapai Sebesar **Rp .2.161.895.500,-**

**Tabel 3.9**

**Rincian Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>11.669.307.353</b>	<b>10.211.950.778</b>	<b>87,51 %</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>11.512.014.535</b>	<b>10.211.950.778</b>	<b>88,71 %</b>
	-Belanja pegawai	2.610.871.611	2.302.575.009	88,19 %
	-Belanja Barang Dan Jasa	6.156.892.924	5.165.125.679	83,89 %
	-Belanja Hibah	2.744.250.000	2.744.250.000	100,00 %
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>11.512.014.535</b>	<b>10.211.950.778</b>	<b>88,71 %</b>
	<b>Belanja Modal</b>	<b>157.293.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.293.000	0	0,00 %
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>157.293.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.669.307.535</b>	<b>10.211.950.778</b>	<b>87,51 %</b>
	<b>Surplus/defisit</b>	<b>11.669.307.535</b>	<b>10.211.950.778</b>	<b>87,51 %</b>

Tabel 3.10

## Rincian Anggaran Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran	Realisasi	Persen %	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.541.000	Rp 6.066.000	Rp 5.871.000	96,79
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.343.000	Rp 5.967.000	Rp 5.705.000	95,61
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.828.908.492	Rp 2.610.871.611	Rp 2.302.575.099	88,19
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.635.000	Rp 6.215.000	Rp 5.965.000	95,98
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 7.281.000	Rp 5.936.000	Rp 5.740.000	96,7
		6	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya	Rp 51.400.000	-	-	0
		7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 7.323.000	Rp 5.987.000	Rp 5.918.000	98,85
		8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.798.000	21,6
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 38.638.000	Rp 38.638.000	Rp 38.638.000	100
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 97.498.250	Rp 97.493.750	Rp 97.489.250	100
		11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 201.093.422	Rp 208.686.711	Rp 208.683.000	100
		12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 98.495.000	Rp 48.787.000	Rp 48.787.000	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran	Realisasi	Persen %	
		13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 71.481.000	Rp 32.232.000	Rp 32.232.000	100
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 100.000.000	Rp 39.250.000	Rp 37.654.750	95,94
		15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-	0
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 157.293.000	Rp 157.293.000	-	0
		17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000	-	-	0
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.482.000	Rp 20.482.000	Rp 20.480.000	99,99
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.960.728	Rp 99.960.728	Rp 71.828.265	71,86
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 574.340.000	Rp 640.340.000	Rp 615.443.840	96,11
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.900.000	Rp 29.900.000	Rp 28.477.038	95,24
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.180.000	Rp 27.180.000	Rp 27.180.000	100
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.569.289.970	Rp 1.605.424.485	Rp 1.387.653.400	86,44

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran	Realisasi	Persen %	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 3.158.120.000	Rp 2.744.250.000	Rp 2.744.250.000	100
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 654.693.000	Rp 432.037.500	Rp 361.087.000	83,58
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 779.752.000	Rp 422.020.000	Rp 238.382.000	56,49
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 100.000.000	Rp 54.232.500	Rp 35.508.000	65,47

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran	Realisasi	Persen %
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 38.720.000	Rp 17.280.000	Rp 5.830.000	33,74
		3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 52.943.000	Rp 50.881.750	Rp 39.256.750	77,15
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 152.960.000	Rp 129.190.500	Rp 110.221.500	85,32

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran	Realisasi	Persen %
	Penanganan Konflik Sosial	2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 1.033.220.000	Rp 849.491.500	Rp 792.931.386	93,34
		3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.190.240.000	Rp 1.183.213.500	Rp 927.365.500	78,38
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 13.273.730.862</b>	<b>Rp 11.669.307.535</b>	<b>Rp 10.211.950.778</b>	<b>87,51</b>

### 3.3 Penghargaan/Prestasi dan Inovasi Teknologi

Tabel 3.11

#### Penghargaan/Prestasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	PNS Berprestasi Kategori Inspiratif	Bupati Purwakarta	Ilyas Hasanudin, S.STP M,Msi ( Kepala Bidang Politik Dalam Negeri)
2	Partisipasi lomba inovasi daerah Kabupaten Purwakarta, PADI Award (LIKE U, Layanan Informasi Kesbangpol Terpadu)	Bapperida	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Partisipasi lomba inovasi daerah Kabupaten Purwakarta, PADI Award (SIPOTEK, Sistem Pelaporan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing)	Bapperida	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Inovasi Teknologi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

##### Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

1. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-orang-asing>



#### Pelaporan Orang Asing & TKA

Layanan kesbangpol untuk memvalidasi dan membantu dalam pelaporan orang asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Purwakarta.

2. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-ormas>



#### Layanan Pelaporan Ormas

Layanan pelaporan khusus untuk organisasi masyarakat (Ormas) yang membutuhkan bantuan dalam proses pelaporannya.

Surat Keterangan Pencatatan Pelaporan Ormas

3. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-partai-politik>



### Layanan Pelaporan Partai Politik

Layanan pelaporan yang dirancang khusus untuk partai politik yang membutuhkan asistensi dalam proses pelaporannya.

Surat Keterangan Pencatatan Pelaporan Partai Politik

4. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pengantar-izin-penelitian>

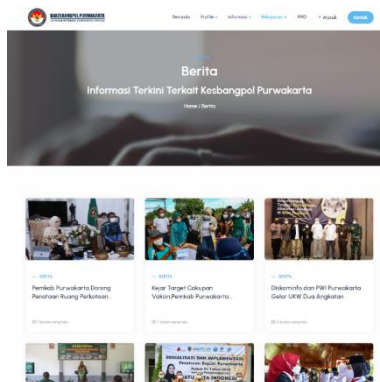


### Bantuan Izin Penelitian Mahasiswa

Bantuan dalam proses pengurusan izin penelitian untuk mahasiswa yang membutuhkan izin dari instansi terkait

Surat Pengantar Izin Penelitian

5. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id>



LIKE U, Layanan Informasi Kesbangpol Terpadu

## **BAB IV PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, memperoleh katagori capaian Sangat Tinggi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 96,92%. Maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2025, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar **Rp 10.211.950.778 (87,51%)** dari target total belanja yang ditetapkan sebesar **Rp 11.669.307.535**.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

### 3.1 Saran

Keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ke depan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja perangkat daerah melalui peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja. Upaya ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian SAKIP Perangkat Daerah agar tetap berada pada kategori sangat baik serta sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat serta menindaklanjuti masukan dan saran dari masyarakat. Evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan proses layanan agar target kepuasan masyarakat dapat tercapai dan dipertahankan.
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik, dan wawasan kebangsaan yang menysasar berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan persentase pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu, partai politik, serta pemangku kepentingan lainnya. Tindak lanjut ini diarahkan pada peningkatan literasi politik masyarakat serta penciptaan iklim politik yang kondusif, partisipatif, dan demokratis, terutama pada tahun-tahun pelaksanaan pemilu dan pilkada.

5. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, penataan administrasi dan pelaporan kegiatan, serta penguatan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah guna mencapai target keterlibatan dan kontribusi ormas sesuai standar nasional.
6. Melaksanakan penguatan forum-forum dialog lintas agama, fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama, serta peningkatan koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama agar tetap berada pada kategori baik sesuai dengan benchmarking nasional.
7. Memperkuat sistem deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan dan perangkat daerah terkait. Tindak lanjut ini diarahkan pada penurunan potensi konflik dan peningkatan tingkat penyelesaian konflik sosial secara cepat, tepat, dan berkeadilan.

Demikian hasil LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Purwakarta, 21 Januari 2026  
**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si**  
**NIP. 19661222 199603 1 004**

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 e-mail : [kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com](mailto:kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com)

PURWAKARTA 41115

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 800/Kep.60-Kesbangpol/2026

TENTANG  
TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja daeri suatu Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus 1 Tahun Anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenrdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Menetapkan

: MEMUTUSKAN

**KESATU**

: Pembentukan TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

## **KEDUA**

Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta 2025 terdiri dari Pejabat dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## **KETIGA**

Menugaskan kepada Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk:

- a. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
- b. Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
- c. Membuat Rekap DPA tahun laporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap kegiatan, jumlah harga barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap kegiatan yang ada pada DPA tersebut;
- d. Mengumpulkan rencana strategik 5 tahun yang telah di buat;
- e. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu penerimaan DPA ( Memindahkan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DPA yang akan dilaksanakan);
- f. Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) atas dasar penetapan kinerja (isi RKT dimaksud adalah semua kegiatan yang ada pada DPA tahun yang dilaporkan dan telah sesuai dilaksanakan);
- g. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan;
- h. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
- i. Melakukan Evaluasi kinerja;
- j. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan);
- k. Analisis efektivitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak);
- l. Analisis Akuntabilitas (untuk mengetahui antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi);
- m. Melakukan penyusunan LAKIP (Narasi LAKIP);

**KEEMPAT**

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 05 Januari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si**  
**NIP.19661222 199603 1 004**



Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta  
Nomor : 800/Kep.60-Kesbangpol/2026  
Tanggal : 03 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	sekretaris	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik 2. Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Ormas 3. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan 4. Kepegawaian 5. Staf Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA

**Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si**  
NIP.19661222 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 Email : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com  
PURWAKARTA 41115

LEMBAR PARAF

Perihal : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta

PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	YUS DJUNAEDI RUSLI,S.STP.,M.Si	Plt. Kepala Badan Kesbangpol	

PERANGKAT DAERAH KOORDINASI

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. RAHMAT HERIANSYAH, S.Sos.,M.Si	Assisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

12/2-  
2  
188



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 e-mail : [kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com](mailto:kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com)  
PURWAKARTA 41115

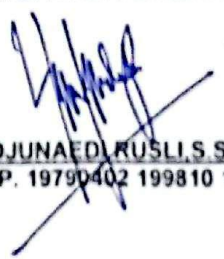
NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Purwakarta  
Dari : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Nomor : 800.1.44/52-Kesbangpol/2025  
Tanggal : 03 Januari 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perjanjian Kinerja

Disampaikan dengan hormat, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor: 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Unit Kerja, maka untuk Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 mohon kiranya Bapak Pj Bupati dapat berkenan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

**PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

  
**YUS DJUNAEDI RUSLI, S. STP., M. Si**  
NIP. 19790402 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 e-mail : [kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com](mailto:kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com)  
PURWAKARTA 41115

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUS DJUNAEDI RUSLI,S.STP.M.SI**

Jabatan : Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta  
**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta

**Selanjutnya disebut pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,03 Januari 2025

**Pj. BUPATI PURWAKARTA**  
( Pihak Kedua )

  
**BENNI IRWAN**

**Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**  
( Pihak Pertama )

  
**YUS DJUNAEDI RUSLI,S.STP.,M.SI**  
NIP. 19790402 199810 1 001

Paraf pemprakarsa		
Yus Djunaedi Rusli, S.STP.M.SI	Plt.Kaban Bakesbangpol	
Paraf koordinasi		
Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si.	Assda I	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2025  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	100%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Tingkat Peserta Pembinaan Kegiatan Politik.	100%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas yang menyampaikan Laporan Kegiatan	100%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Tingkat peserta Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.	100%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.543.792.892,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.569.289.970,-
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.812.813.000,-


4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 779.752.000,-
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 191.663.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.376.420.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 13.273.730.862,-</b>




Purwakarta, 03 Januari 2025

**Pj. BUPATI PURWAKARTA**  
( Pihak Kedua )

  
**BENNI IRWAN**

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**  
( Pihak Pertama )

  
**YUS DJUNABDI RUSLI, S.STP., M.Si**  
NIP. 19790402199810 1 001

Paraf pemprakarsa		
Yus Djunaedi Rusli, S.STP.M.Si	Plt.Kaban Bakesbangpol	
Paraf koordinasi		
Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si.	Assda I	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN OPD  
KABUPATEN/KOTA PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
TRIWULAN I**

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sub Unit</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>Rp.11.669.307.535</b>	<b>Rp.1.425.692.113</b>	<b>Rp.10.243.615.422</b>	<b>12,22%</b>						
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.4.181.285.800</b>	<b>Rp.836.994.113</b>	<b>Rp.3.344.291.687</b>	<b>20,02%</b>						
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.12.033.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.12.033.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.6.066.000	Rp.0	Rp.6.066.000	0,00%	94,05%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.967.000	Rp.0	Rp.5.967.000	0,00%	91,37%	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.617.086.611</b>	<b>Rp.586.831.811</b>	<b>Rp.2.030.254.800</b>	<b>22,42%</b>						
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.610.871.611	Rp.586.831.811	Rp.2.024.039.800	22,48%	52,10%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	Orang/Bulan
8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.6.215.000	Rp.0	Rp.6.215.000	0,00%	91,82%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.5.936.000	Rp.0	Rp.5.936.000	0,00%	93,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Peawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	0	Paket
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.5.987.000	Rp.0	Rp.5.987.000	0,00%	95,42%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	21,60%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	2	Orang
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.515.087.461</b>	<b>Rp.68.879.725</b>	<b>Rp.446.207.736</b>	<b>13,37%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.38.638.000	Rp.3.464.000	Rp.35.174.000	8,97%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	18	Paket
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.97.493.750	Rp.9.406.975	Rp.88.086.775	9,65%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	1	Paket
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.208.686.711	Rp.33.199.000	Rp.175.487.711	15,91%	99,89%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	Paket
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.48.787.000	Rp.15.028.000	Rp.33.759.000	30,80%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	Paket
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.32.232.000	Rp.0	Rp.32.232.000	0,00%	66,34%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.39.250.000	Rp.7.781.750	Rp.31.468.250	19,83%	87,76%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	Dokumen
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.157.293.000	Rp.0	Rp.157.293.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	0	Unit
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	Unit
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.760.782.728</b>	<b>Rp.166.974.689</b>	<b>Rp.593.808.039</b>	<b>21,95%</b>						
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.20.482.000	Rp.2.000.000	Rp.18.482.000	9,76%	99,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.99.960.728	Rp.17.133.879	Rp.82.826.849	17,14%	84,34%	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.640.340.000	Rp.147.840.810	Rp.492.499.190	23,09%	56,57%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	Laporan
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.57.080.000</b>	<b>Rp.14.307.888</b>	<b>Rp.42.772.112</b>	<b>25,07%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.29.900.000	Rp.12.157.888	Rp.17.742.112	40,66%	65,74%	Meningkatnya Kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	Unit
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.27.180.000	Rp.2.150.000	Rp.25.030.000	7,91%	99,99%	Meningkatnya kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	Unit
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.63.307.000</b>	<b>Rp.1.542.117.485</b>	<b>3,94%</b>						
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.63.307.000</b>	<b>Rp.1.542.117.485</b>	<b>3,94%</b>						
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1.605.424.485	Rp.63.307.000	Rp.1.542.117.485	3,94%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	250	50	Orang
		Rp.1.605.424.485	Rp.63.307.000	Rp.1.542.117.485	%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	50	Orang
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.77.114.000</b>	<b>Rp.3.099.173.500</b>	<b>2,43%</b>						
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.77.114.000</b>	<b>Rp.3.099.173.500</b>	<b>2,43%</b>						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	0,00%	50,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	48	0	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
		Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48	0	Orang
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.432.037.500	Rp.77.114.000	Rp.354.923.500	17,85%	87,39%	Meningkatkan Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.77.114.000	Rp.354.923.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.77.114.000	Rp.354.923.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Perwakilan dan Partai Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.77.114.000	Rp.354.923.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.77.114.000	Rp.354.923.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	Laporan
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp.422.020.000</b>	<b>Rp.24.248.000</b>	<b>Rp.397.772.000</b>	<b>5,75%</b>						
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Rp.422.020.000</b>	<b>Rp.24.248.000</b>	<b>Rp.397.772.000</b>	<b>5,75%</b>						
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.422.020.000	Rp.24.248.000	Rp.397.772.000	5,75%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas	150	80	Orang
		Rp.422.020.000	Rp.24.248.000	Rp.397.772.000	%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	80	Orang
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Rp.122.394.250</b>	<b>Rp.10.540.000</b>	<b>Rp.111.854.250</b>	<b>8,61%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran				
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.122.394.250	Rp.10.540.000	Rp.111.854.250	8,61%							
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.54.232.500	Rp.0	Rp.54.232.500	0,00%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	100	50		Orang
		Rp.54.232.500	Rp.0	Rp.54.232.500	%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	50		Orang
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.17.280.000	Rp.0	Rp.17.280.000	0,00%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	20	20		Orang
		Rp.17.280.000	Rp.0	Rp.17.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	20	20		Orang
		Rp.17.280.000	Rp.0	Rp.17.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	20		Orang
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.50.881.750	Rp.10.540.000	Rp.40.341.750	20,71%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1	1		Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.10.540.000	Rp.40.341.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	1	1		Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.10.540.000	Rp.40.341.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1		Laporan
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.2.161.895.500	Rp.413.489.000	Rp.1.748.406.500	19,13%							
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.2.161.895.500	Rp.413.489.000	Rp.1.748.406.500	19,13%							

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.129.190.500	Rp.28.370.000	Rp.100.820.500	21,96%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.28.370.000	Rp.100.820.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.28.370.000	Rp.100.820.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13	5	Orang
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.849.491.500	Rp.191.325.000	Rp.658.166.500	22,52%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.191.325.000	Rp.658.166.500	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.191.325.000	Rp.658.166.500	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	8	Laporan
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.183.213.500	Rp.193.794.000	Rp.989.419.500	16,38%	68,99%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	8	Dokumen

Purwakarta, 23 Januari 2026  
Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta

**dr.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes**  
NIP. 196902272003121003

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN OPD  
KABUPATEN/KOTA PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
TRIWULAN II**

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sub Unit</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>Rp.11.669.307.535</b>	<b>Rp.2.960.090.643</b>	<b>Rp.8.709.216.892</b>	<b>25,37%</b>						
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.4.181.285.800</b>	<b>Rp.1.670.326.157</b>	<b>Rp.2.510.959.643</b>	<b>39,95%</b>						
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.12.033.000</b>	<b>Rp.4.785.000</b>	<b>Rp.7.248.000</b>	<b>39,77%</b>						
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.6.066.000	Rp.0	Rp.6.066.000	0,00%	94,05%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.967.000	Rp.4.785.000	Rp.1.182.000	80,19%	91,37%	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.617.086.611</b>	<b>Rp.1.138.106.174</b>	<b>Rp.1.478.980.437</b>	<b>43,49%</b>						
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.610.871.611	Rp.1.133.061.174	Rp.1.477.810.437	43,40%	52,10%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	Orang/Bulan
8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.6.215.000	Rp.5.045.000	Rp.1.170.000	81,17%	91,82%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.5.936.000	Rp.0	Rp.5.936.000	0,00%	93,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	0	Paket
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.5.987.000	Rp.0	Rp.5.987.000	0,00%	95,42%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	21,60%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	2	Orang
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.515.087.461</b>	<b>Rp.191.927.220</b>	<b>Rp.323.160.241</b>	<b>37,26%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.38.638.000	Rp.17.555.000	Rp.21.083.000	45,43%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	18	Paket
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.97.493.750	Rp.38.950.970	Rp.58.542.780	39,95%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	1	Paket
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.208.686.711	Rp.85.599.000	Rp.123.087.711	41,02%	99,89%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	Paket
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.48.787.000	Rp.25.635.000	Rp.23.152.000	52,54%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	Paket
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.32.232.000	Rp.7.280.000	Rp.24.952.000	22,59%	66,34%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.39.250.000	Rp.16.907.250	Rp.22.342.750	43,08%	87,76%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	Dokumen
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.157.293.000	Rp.0	Rp.157.293.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	0	Unit
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	Unit
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.760.782.728</b>	<b>Rp.312.209.825</b>	<b>Rp.448.572.903</b>	<b>41,04%</b>						
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.20.482.000	Rp.7.000.000	Rp.13.482.000	34,18%	99,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.99.960.728	Rp.33.319.415	Rp.66.641.313	33,33%	84,34%	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.640.340.000	Rp.271.890.410	Rp.368.449.590	42,46%	56,57%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	Laporan
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.57.080.000</b>	<b>Rp.23.297.938</b>	<b>Rp.33.782.062</b>	<b>40,82%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.29.900.000	Rp.14.047.938	Rp.15.852.062	46,98%	65,74%	Meningkatnya Kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	Unit
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.27.180.000	Rp.9.250.000	Rp.17.930.000	34,03%	99,99%	Meningkatnya kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	Unit
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.141.426.000</b>	<b>Rp.1.463.998.485</b>	<b>8,81%</b>						
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.141.426.000</b>	<b>Rp.1.463.998.485</b>	<b>8,81%</b>						
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1.605.424.485	Rp.141.426.000	Rp.1.463.998.485	8,81%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	250	50	Orang
		Rp.1.605.424.485	Rp.141.426.000	Rp.1.463.998.485	%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	50	Orang
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.196.312.500</b>	<b>Rp.2.979.975.000</b>	<b>6,18%</b>						
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.196.312.500</b>	<b>Rp.2.979.975.000</b>	<b>6,18%</b>						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	0,00%	50,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.0	Rp.2.744.250.000	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48	0	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran				
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.432.037.500	Rp.196.312.500	Rp.235.725.000	45,44%	87,39%	Meningkatkan Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	4	4		Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.196.312.500	Rp.235.725.000	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4		Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.196.312.500	Rp.235.725.000	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Perwakilan dan Partai Politik	4	4		Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.196.312.500	Rp.235.725.000	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	4	4		Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.196.312.500	Rp.235.725.000	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4		Laporan
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Rp.422.020.000	Rp.70.441.000	Rp.351.579.000	16,69%							
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Rp.422.020.000	Rp.70.441.000	Rp.351.579.000	16,69%							
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.422.020.000	Rp.70.441.000	Rp.351.579.000	16,69%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas	150	80		Orang
		Rp.422.020.000	Rp.70.441.000	Rp.351.579.000	%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	80		Orang
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Rp.122.394.250	Rp.31.611.000	Rp.90.783.250	25,83%							
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Rp.122.394.250	Rp.31.611.000	Rp.90.783.250	25,83%							

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.54.232.500	Rp.4.531.000	Rp.49.701.500	8,35%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	100	50	Orang
		Rp.54.232.500	Rp.4.531.000	Rp.49.701.500	%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	50	Orang
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	23,15%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	20	20	Orang
		Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	20	20	Orang
		Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	20	Orang
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.50.881.750	Rp.23.080.000	Rp.27.801.750	45,36%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1	1	Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.23.080.000	Rp.27.801.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	1	1	Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.23.080.000	Rp.27.801.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	Laporan
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Rp.2.161.895.500</b>	<b>Rp.849.973.986</b>	<b>Rp.1.311.921.514</b>	<b>39,32%</b>						
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Rp.2.161.895.500</b>	<b>Rp.849.973.986</b>	<b>Rp.1.311.921.514</b>	<b>39,32%</b>						
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.129.190.500	Rp.62.060.000	Rp.67.130.500	48,04%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	13	5	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
		Rp.129.190.500	Rp.62.060.000	Rp.67.130.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.62.060.000	Rp.67.130.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13	5	Orang
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.849.491.500	Rp.405.193.486	Rp.444.298.014	47,70%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.405.193.486	Rp.444.298.014	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.405.193.486	Rp.444.298.014	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	8	Laporan
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.183.213.500	Rp.382.720.500	Rp.800.493.000	32,35%	68,99%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	8	Dokumen

Purwakarta, 27 Januari 2026  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta

**dr.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes**  
NIP. 196902272003121003

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN OPD  
KABUPATEN/KOTA PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
TRIWULAN III**

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sub Unit</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>Rp.11.669.307.535</b>	<b>Rp.8.073.860.842</b>	<b>Rp.3.595.446.693</b>	<b>69,19%</b>						
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.4.181.285.800</b>	<b>Rp.2.598.439.456</b>	<b>Rp.1.582.846.344</b>	<b>62,14%</b>						
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.12.033.000</b>	<b>Rp.9.736.000</b>	<b>Rp.2.297.000</b>	<b>80,91%</b>						
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.6.066.000	Rp.4.951.000	Rp.1.115.000	81,62%	94,05%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.967.000	Rp.4.785.000	Rp.1.182.000	80,19%	91,37%	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.617.086.611</b>	<b>Rp.1.691.468.301</b>	<b>Rp.925.618.310</b>	<b>64,63%</b>						
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.610.871.611	Rp.1.686.423.301	Rp.924.448.310	64,59%	52,10%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	Orang/Bulan
8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.6.215.000	Rp.5.045.000	Rp.1.170.000	81,17%	91,82%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>Rp.4.820.000</b>	<b>Rp.1.116.000</b>	<b>81,20%</b>						
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.5.936.000	Rp.4.820.000	Rp.1.116.000	81,20%	93,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>Rp.4.420.000</b>	<b>Rp.51.567.000</b>	<b>7,89%</b>						
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	0	Paket
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.5.987.000	Rp.0	Rp.5.987.000	0,00%	95,42%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.50.000.000	Rp.4.420.000	Rp.45.580.000	8,84%	21,60%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	2	Orang
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.515.087.461</b>	<b>Rp.290.231.005</b>	<b>Rp.224.856.456</b>	<b>56,35%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.38.638.000	Rp.29.589.000	Rp.9.049.000	76,58%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	18	Paket
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.97.493.750	Rp.63.363.755	Rp.34.129.995	64,99%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	1	Paket
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.208.686.711	Rp.119.079.000	Rp.89.607.711	57,06%	99,89%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	Paket
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.48.787.000	Rp.36.324.500	Rp.12.462.500	74,46%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	Paket
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.32.232.000	Rp.10.080.000	Rp.22.152.000	31,27%	66,34%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.39.250.000	Rp.31.794.750	Rp.7.455.250	81,01%	87,76%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	Dokumen
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.157.293.000	Rp.0	Rp.157.293.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	0	Unit
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	Unit
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.760.782.728</b>	<b>Rp.557.166.112</b>	<b>Rp.203.616.616</b>	<b>73,24%</b>						
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.20.482.000	Rp.15.000.000	Rp.5.482.000	73,24%	99,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.99.960.728	Rp.52.611.492	Rp.47.349.236	52,63%	84,34%	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.640.340.000	Rp.489.554.620	Rp.150.785.380	76,45%	56,57%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	Laporan
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.57.080.000</b>	<b>Rp.40.598.038</b>	<b>Rp.16.481.962</b>	<b>71,12%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.29.900.000	Rp.19.138.038	Rp.10.761.962	64,01%	65,74%	Meningkatnya Kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	Unit
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.27.180.000	Rp.21.460.000	Rp.5.720.000	78,96%	99,99%	Meningkatnya kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	Unit
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.717.796.000</b>	<b>Rp.887.628.485</b>	<b>44,71%</b>						
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.717.796.000</b>	<b>Rp.887.628.485</b>	<b>44,71%</b>						
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1.605.424.485	Rp.717.796.000	Rp.887.628.485	44,71%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	250	50	Orang
		Rp.1.605.424.485	Rp.717.796.000	Rp.887.628.485	%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	50	Orang
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.3.038.077.000</b>	<b>Rp.138.210.500</b>	<b>95,65%</b>						
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.3.038.077.000</b>	<b>Rp.138.210.500</b>	<b>95,65%</b>						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	100,00%	50,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48	0	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.432.037.500	Rp.293.827.000	Rp.138.210.500	68,01%	87,39%	Meningkatkan Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.293.827.000	Rp.138.210.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.293.827.000	Rp.138.210.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Perwakilan dan Partai Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.293.827.000	Rp.138.210.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.293.827.000	Rp.138.210.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	Laporan
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Rp.422.020.000	Rp.148.697.000	Rp.273.323.000	35,23%						
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Rp.422.020.000	Rp.148.697.000	Rp.273.323.000	35,23%						
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.422.020.000	Rp.148.697.000	Rp.273.323.000	35,23%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas	150	80	Orang
		Rp.422.020.000	Rp.148.697.000	Rp.273.323.000	%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	80	Orang
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Rp.122.394.250	Rp.66.703.000	Rp.55.691.250	54,50%						
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Rp.122.394.250	Rp.66.703.000	Rp.55.691.250	54,50%						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.54.232.500	Rp.25.533.000	Rp.28.699.500	47,08%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	100	50	Orang
		Rp.54.232.500	Rp.25.533.000	Rp.28.699.500	%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	50	Orang
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	23,15%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	20	20	Orang
		Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	20	20	Orang
		Rp.17.280.000	Rp.4.000.000	Rp.13.280.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	20	Orang
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.50.881.750	Rp.37.170.000	Rp.13.711.750	73,05%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1	1	Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.37.170.000	Rp.13.711.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	1	1	Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.37.170.000	Rp.13.711.750	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	Laporan
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Rp.2.161.895.500</b>	<b>Rp.1.504.148.386</b>	<b>Rp.657.747.114</b>	<b>69,58%</b>						
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Rp.2.161.895.500</b>	<b>Rp.1.504.148.386</b>	<b>Rp.657.747.114</b>	<b>69,58%</b>						
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.129.190.500	Rp.92.060.000	Rp.37.130.500	71,26%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	13	5	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
		Rp.129.190.500	Rp.92.060.000	Rp.37.130.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.92.060.000	Rp.37.130.500	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13	5	Orang
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.849.491.500	Rp.638.967.886	Rp.210.523.614	75,22%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.638.967.886	Rp.210.523.614	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.638.967.886	Rp.210.523.614	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	8	Laporan
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.183.213.500	Rp.773.120.500	Rp.410.093.000	65,34%	68,99%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	8	Dokumen

Purwakarta, 27 Januari 2026  
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Purwakarta

**dr.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes**  
 NIP. 196902272003121003

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN OPD  
KABUPATEN/KOTA PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
TRIWULAN IV

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sub Unit</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>Rp.11.669.307.535</b>	<b>Rp.10.184.350.778</b>	<b>Rp.1.484.956.757</b>	<b>87,27%</b>						
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.4.181.285.800</b>	<b>Rp.3.569.465.242</b>	<b>Rp.611.820.558</b>	<b>85,37%</b>						
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.12.033.000</b>	<b>Rp.11.576.000</b>	<b>Rp.457.000</b>	<b>96,20%</b>						
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.6.066.000	Rp.5.871.000	Rp.195.000	96,79%	94,05%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.967.000	Rp.5.705.000	Rp.262.000	95,61%	91,37%	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.617.086.611</b>	<b>Rp.2.308.540.099</b>	<b>Rp.308.546.512</b>	<b>88,21%</b>						
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.610.871.611	Rp.2.302.575.099	Rp.308.296.512	88,19%	52,10%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	Orang/Bulan
8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.6.215.000	Rp.5.965.000	Rp.250.000	95,98%	91,82%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.5.936.000</b>	<b>Rp.5.740.000</b>	<b>Rp.196.000</b>	<b>96,70%</b>						
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.5.936.000	Rp.5.740.000	Rp.196.000	96,70%	93,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.55.987.000</b>	<b>Rp.16.716.000</b>	<b>Rp.39.271.000</b>	<b>29,86%</b>						
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Peawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	0	Paket
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.5.987.000	Rp.5.918.000	Rp.69.000	98,85%	95,42%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.50.000.000	Rp.10.798.000	Rp.39.202.000	21,60%	21,60%	Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	2	Orang
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.515.087.461</b>	<b>Rp.463.484.000</b>	<b>Rp.51.603.461</b>	<b>89,98%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.38.638.000	Rp.38.638.000	Rp.0	100,00%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	18	Paket
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.97.493.750	Rp.97.489.250	Rp.4.500	100,00%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	1	Paket
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.208.686.711	Rp.208.683.000	Rp.3.711	100,00%	99,89%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	Paket
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.48.787.000	Rp.48.787.000	Rp.0	100,00%	99,99%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	Paket
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.32.232.000	Rp.32.232.000	Rp.0	100,00%	66,34%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.39.250.000	Rp.37.654.750	Rp.1.595.250	95,94%	87,76%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.50.000.000	Rp.0	Rp.50.000.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	Dokumen
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.157.293.000</b>	<b>0,00%</b>						
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.157.293.000	Rp.0	Rp.157.293.000	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	0	Unit
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	Unit
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.760.782.728</b>	<b>Rp.707.752.105</b>	<b>Rp.53.030.623</b>	<b>93,03%</b>						
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.20.482.000	Rp.20.480.000	Rp.2.000	99,99%	99,98%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.99.960.728	Rp.71.828.265	Rp.28.132.463	71,86%	84,34%	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8	Laporan
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.640.340.000	Rp.615.443.840	Rp.24.896.160	96,11%	56,57%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	Laporan
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.57.080.000</b>	<b>Rp.55.657.038</b>	<b>Rp.1.422.962</b>	<b>97,51%</b>						

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.29.900.000	Rp.28.477.038	Rp.1.422.962	95,24%	65,74%	Meningkatnya Kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	Unit
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.27.180.000	Rp.27.180.000	Rp.0	100,00%	99,99%	Meningkatnya kualitas Aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	Unit
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0,00%	0,00%					
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.1.387.653.400</b>	<b>Rp.217.771.085</b>	<b>86,44%</b>						
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.1.605.424.485</b>	<b>Rp.1.387.653.400</b>	<b>Rp.217.771.085</b>	<b>86,44%</b>						
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1.605.424.485	Rp.1.387.653.400	Rp.217.771.085	86,44%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	250	50	Orang
		Rp.1.605.424.485	Rp.1.387.653.400	Rp.217.771.085	%	59,78%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Menikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	50	Orang
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.3.105.337.000</b>	<b>Rp.70.950.500</b>	<b>97,77%</b>						
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Rp.3.176.287.500</b>	<b>Rp.3.105.337.000</b>	<b>Rp.70.950.500</b>	<b>97,77%</b>						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	100,00%	50,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	48	0	Orang
		Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	48	0	Orang

No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
		Rp.2.744.250.000	Rp.2.744.250.000	Rp.0	%	50,00%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48	0	Orang
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.432.037.500	Rp.361.087.000	Rp.70.950.500	83,58%	87,39%	Meningkatkan Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.361.087.000	Rp.70.950.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.361.087.000	Rp.70.950.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Perwakilan dan Partai Politik	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.361.087.000	Rp.70.950.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	4	4	Laporan
		Rp.432.037.500	Rp.361.087.000	Rp.70.950.500	%	87,39%	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	Laporan
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Rp.422.020.000	Rp.210.782.000	Rp.211.238.000	49,95%						
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Rp.422.020.000	Rp.210.782.000	Rp.211.238.000	49,95%						
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.422.020.000	Rp.210.782.000	Rp.211.238.000	49,95%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas	150	80	Orang
		Rp.422.020.000	Rp.210.782.000	Rp.211.238.000	%	61,82%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	80	Orang
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Rp.122.394.250	Rp.80.594.750	Rp.41.799.500	65,85%						



No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran				
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.122.394.250	Rp.80.594.750	Rp.41.799.500	65,85%							
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.54.232.500	Rp.35.508.000	Rp.18.724.500	65,47%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	100	50		Orang
		Rp.54.232.500	Rp.35.508.000	Rp.18.724.500	%	43,89%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	50		Orang
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.17.280.000	Rp.5.830.000	Rp.11.450.000	33,74%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	20	20		Orang
		Rp.17.280.000	Rp.5.830.000	Rp.11.450.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	20	20		Orang
		Rp.17.280.000	Rp.5.830.000	Rp.11.450.000	%	21,03%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	20		Orang
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.50.881.750	Rp.39.256.750	Rp.11.625.000	77,15%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1	1		Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.39.256.750	Rp.11.625.000	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	1	1		Laporan
		Rp.50.881.750	Rp.39.256.750	Rp.11.625.000	%	71,16%	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1		Laporan
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.2.161.895.500	Rp.1.830.518.386	Rp.331.377.114	84,67%							
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.2.161.895.500	Rp.1.830.518.386	Rp.331.377.114	84,67%							



No/Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Biaya			Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.129.190.500	Rp.110.221.500	Rp.18.969.000	85,32%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.110.221.500	Rp.18.969.000	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	13	5	Orang
		Rp.129.190.500	Rp.110.221.500	Rp.18.969.000	%	46,00%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13	5	Orang
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.849.491.500	Rp.792.931.386	Rp.56.560.114	93,34%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.792.931.386	Rp.56.560.114	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	12	8	Laporan
		Rp.849.491.500	Rp.792.931.386	Rp.56.560.114	%	81,62%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	8	Laporan
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.183.213.500	Rp.927.365.500	Rp.255.848.000	78,38%	68,99%	Meningkatnya Kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	8	Dokumen

Purwakarta, 27 Januari 2026  
Ptt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta

**dr.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes**  
NIP. 196902272003121003